

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam menghadapi tantangan zaman, birokrasi sebagai pelaksana pelayanan publik harus mampu mencerminkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pemerintah bukan lagi instansi yang bertindak dengan kehendak sendiri dalam menyelenggarakan pelayanan. Perlu ada pemahaman apa yang diinginkan masyarakat untuk dapat mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang maksimal merupakan hak sebagai warga negara, sehingga pemerintah dituntut untuk berpikir cerdas dalam merespon dan memenuhi ekspektasi publik.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan publik di era perkembangan teknologi sebagai dampak dari revolusi industri 4.0 telah melahirkan berbagai inovasi yang mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola di berbagai sektor (Santoso et al., 2019). Salah satu sektor yang mengalami perubahan signifikan adalah sektor publik dan pemerintahan, yang kini semakin memanfaatkan teknologi digital, baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun dalam pengelolaan data publik, sebagaimana tercermin dalam penerapan konsep *smart city* (Kementerian Dalam Negeri, 2019). Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), tantangan terbesar bagi pemerintah Indonesia adalah kemampuan dalam memproduksi kebijakan publik yang berkualitas guna memperkuat daya saing nasional sesuai dengan peluang dan sumber daya yang dimiliki (Paat, 2016). Kebijakan publik yang berkualitas tidak hanya berhenti pada tahap perumusan, tetapi juga harus diimplementasikan secara efektif melalui kinerja birokrasi yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pelayanan publik merupakan wajah utama dari kehadiran negara di tengah masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan meningkatnya ekspektasi publik, instansi pemerintah dituntut untuk tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga melakukan transformasi melalui berbagai inovasi. Inovasi pelayanan publik menjadi kunci utama dalam



kelola pemerintahan yang responsif terhadap dinamika lokal yang kian kompleks, terutama di wilayah perkotaan besar. Namun, tantangan terbesar dalam penciptaan inovasi bagaimana memastikan bahwa inovasi tersebut benar-benar sejalan, bukan sekedar kebijakan reaktif yang bersifat coba-coba. Pentingnya pendekatan *Evidence Based Policy* (EBP) atau

kebijakan berbasis bukti. *Evidence Based Policy* menekankan penggunaan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk membuat keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan termasuk pada tahap implementasi kebijakan (Hernawan et al., 2022). Dengan menggunakan bukti, pemerintah dapat meminimalkan risiko kegagalan kebijakan yang disebabkan oleh pengambilan keputusan yang hanya bersifat intuitif atau politis semata.

Salah satu pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan administrasi kependudukan. Perhatian publik tidak akan pernah lepas dari pelayanan ini, hal ini dikarenakan menjadi salah satu fondasi penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan akses masyarakat terhadap layanan publik. Dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran menjadi prasyarat utama untuk memperoleh berbagai hak sosial-ekonomi, termasuk akses terhadap program bantuan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, dan kepastian hukum. Semua layanan tersebut diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melihat dari fungsinya dapat dibayangkan bahwa instansi pelayanan administrasi kependudukan merupakan pelayanan esensial di dalam suatu negara. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran aktif dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya bergantung pada inisiatif masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, tetapi juga menuntut peran aktif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar sebagai garda terdepan dalam pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) menghadapi tantangan yang sangat nyata. Sebagai kota metropolitan, Makassar memiliki dinamika kependudukan yang sangat tinggi, mulai dari masalah urbanisasi hingga kebutuhan akan kecepatan akses dokumen kependudukan seperti KTP-el, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Guna menjawab tantangan tersebut, Disdukcapil Kota Makassar telah meluncurkan berbagai inovasi pelayanan, mulai dari digitalisasi layanan hingga sistem jemput bola. Akan tetapi, efektivitas inovasi-inovasi tersebut sering kali dihadapkan pada



an non-teknis, seperti kestabilan sistem infrastruktur, hingga tingkat literasi digital masyarakat yang beragam. ungungan data yang kuat dalam setiap tahapan manajemen penilaian program (*program assessment*), alokasi anggaran nt), hingga pemantauan hasil (*outcome monitoring*), maka

inovasi tersebut berisiko menjadi tidak tepat sasaran dan tidak mampu memberikan dampak jangka panjang.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan pentingnya peran data dalam keberlanjutan layanan, penelitian ini memfokuskan analisis pada sejauh mana prinsip-prinsip *Evidence Based Policy* telah diintegrasikan ke dalam manajemen inovasi di Disdukcapil Kota Makassar. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa inovasi yang dilakukan bukan hanya sekadar mengikuti tren digitalisasi, melainkan sebuah transformasi yang berpijak pada kebutuhan riil dan data yang terverifikasi.

Lebih lanjut, penulis melakukan beberapa tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang relevan terkait studi *Evidence Based Policy*. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Haniyuhana dan Agus Widiyarta (2023) yang berjudul “Penerapan *Evidence Based Policy* Dalam Implementasi Program *Smart Village*” Hasil penelitian menunjukkan kebijakan berbasis bukti mampu mendorong inovasi pelayanan publik secara efektif. Pemanfaatan data dan hasil evaluasi dalam fokus *program assessment* menghasilkan berbagai inovasi, seperti pengembangan layanan digital pada aspek *smart governance*, penguatan UMKM dan pengelolaan lingkungan melalui program *one village one product*, serta pengembangan sektor *smart tourism* dan *smart mobility*. Selain itu, bukti kondisi sosial ekonomi digunakan sebagai dasar penyesuaian anggaran (*budget development*), meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana. Pengawasan dan pemantauan hasil program (*implementation oversight* dan *outcome monitoring*) dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memastikan kesesuaian program dengan tujuan kebijakan, sementara *targeted evaluation* diarahkan pada perbaikan tata kelola pelayanan publik melalui pengembangan sistem yang lebih terintegrasi.

Penelitian oleh Sendri Lentari (2024) dengan judul “*Evidence Based Policy Making: Penggunaan Bukti Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Timur*” menunjukkan *Evidence Based Policy* (EBP) merupakan suatu proses dinamis yang mencakup seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perumusan masalah hingga implementasi, di mana bukti tidak hanya terbatas pada hasil riset yang sempurna tetapi juga pada penggunaan bukti yang tersedia secara rasional. Melalui pendekatan programatik pada kasus penanggulangan



di Jawa Timur, ditemukan bahwa karakteristik bukti (jenis, sumber, sangat dipengaruhi oleh logika lembaga pemerintah dan esifik, yang seringkali berbeda dari asumsi awal peneliti. an bukti di lapangan terkadang bersinggungan dengan isu sosial, pendekatan ini memungkinkan adanya transparansi mengenai peningkatan kualitas kebijakan berbasis bukti, baik

pada level program daerah maupun dalam sistem pembuatan kebijakan nasional yang lebih luas.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Viqra Ramadanti (2020) tentang “Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Bappeda Kota Makassar)” menunjukkan bahwa pendekatan Evidence Based Policy telah diterapkan pada seluruh tahapan perencanaan. Pada tahap penilaian program, BAPPEDA bersama SKPD menyusun perencanaan berbasis data dan bukti lapangan melalui pendekatan *bottom-up* yang melibatkan masyarakat sebagai subjek perencanaan. Pada tahap pengembangan anggaran, penyusunan anggaran dilakukan melalui sistem SIADINDA oleh TAPD dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai standar pelayanan minimal. Selanjutnya, pengawasan pelaksanaan program dilakukan secara langsung di lapangan dan tidak langsung melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Pemantauan hasil difokuskan pada pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah, sementara evaluasi yang ditargetkan, digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyesuaian program pembangunan selanjutnya. Temuan ini menegaskan pentingnya penggunaan bukti dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan terarah.

Berdasarkan tinjauan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, secara kolektif menegaskan bahwa *Evidence Based Policy* (EBP) merupakan instrumen krusial dalam menjamin objektivitas dan efektivitas kebijakan. Namun, terdapat celah penelitian yang signifikan di mana studi-studi tersebut mayoritas berfokus pada lokus pedesaan, isu sosial makro (kemiskinan), atau perencanaan pembangunan tingkat atas. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengalihkan fokus analisis pada penerapan EBP di tingkat teknis pelayanan publik perkotaan, khususnya dalam manajemen inovasi pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kota Makassar, yang menuntut integrasi data empiris secara lebih dinamis dan berkelanjutan guna merespons kompleksitas kebutuhan dokumen kependudukan yang tidak dibahas secara mendalam pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pendekatan *Evidence Based Policy* menjadi esensial dalam konteks ini karena menempatkan data empiris, hasil evaluasi, serta bukti terverifikasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan inovasi pelayanan publik, maka dirumuskan pertanyaan penelitian



1. Penerapan *Evidence Based Policy* dalam Inovasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Kota Makassar

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENERAPAN EVIDENCE BASED POLICY DALAM INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR"**.



I.2 Tinjauan Teori

Pendekatan *Evidence Based Policy* (EBP) atau kebijakan berbasis bukti merepresentasikan pergeseran paradigma dalam studi administrasi dan kebijakan publik, di mana pengambilan keputusan tidak lagi didasarkan pada intuisi, selera politik, atau kebiasaan birokrasi semata (*business as usual*), melainkan berpijak pada pembuktian empiris yang kuat. Secara fundamental, EBP menuntut integrasi antara data statistik, hasil riset, serta evaluasi lapangan ke dalam setiap tahapan siklus kebijakan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks inovasi pelayanan publik, penerapan EBP menjadi instrumen esensial untuk memastikan bahwa setiap terobosan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah memiliki landasan argumen yang objektif, dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki peluang keberlanjutan yang lebih tinggi.

Evidence based policy menekankan pentingnya penggunaan bukti yang bersifat rasional dan berbasis hubungan sebab-akibat dalam penyusunan kebijakan, sehingga keputusan yang diambil bersandar pada diagnosis yang tepat dan pengetahuan yang valid (Pawson, 2005). Bukti yang dimaksud dalam pendekatan *kebijakan berbasis bukti* tidak hanya terbatas pada hasil penelitian ilmiah atau kajian akademik, melainkan juga mencakup pemikiran dan pengalaman para ahli, baik dari lembaga riset, perguruan tinggi, sektor swasta, maupun instansi pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan berbasis bukti dapat didefinisikan sebagai suatu kebijakan yang mendasarkan pada bukti (informasi aktual, hasil riset, dan temuan-temuan lain yang kredibel, terkini, dan jelas) sebagai salah satu bagian utama dalam proses pembuatan kebijakan dan menjadi input yang berharga bagi para pembuat kebijakan (Asmara dan Handoyo, 2015).

Kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) menggunakan penelitian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk membuat keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan. Kebijakan yang terjadi pada berbagai tahap dan berkembang dari waktu ke waktu untuk merespons dan mengatasi masalah yang ada dalam implementasinya. Menurut Sanderson (2009), penekanan lebih harus diberikan pada pengembangan basis bukti yang kuat untuk kebijakan melalui evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan dan program. Sementara itu, menurut Sanderson (2009), mengemukakan bahwa praktik berbasis bukti mengusulkan hubungan baik antara penelitian dan pengambil kebijakan, tetapi juga mengusulkan beberapa kekhawatiran tentang jenis bukti, kekuatan penelitian dalam perencanaan, dan ketidaksetaraan sumber daya akses penelitian ke dalam perencanaan. Selanjutnya, dalam pendekatan *evidence based policy* ini, sumber bukti-bukti dari hasil penelitian



digunakan untuk mengisi dan mengidentifikasi celah-celah yang ada, sehingga memudahkan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan (Trisha Greenhalgh & Jill Russell, 2009). Hal ini berarti bahwa penelitian menjadi suatu sumber informasi yang dibutuhkan oleh *policy maker*. Dalam model ini, terdapat hubungan langsung dan linear antara bukti dan pilihan kebijakan. Bukti penelitian (*evidence*) menjadi sebuah proses logis, sedangkan proses teknis diibaratkan sebagai proses pembuatan kebijakan (*policy making*), di mana pembuat kebijakan mendefinisikan masalah, mengidentifikasi apa yang diketahui, mengumpulkan bukti terbaik yang ada, dan membuat pilihan kebijakan (Eden & Wagstaff, 2021).

Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif jika desain atau perencanaan, implementasi, dan evaluasinya didasarkan pada bukti. Kebijakan publik juga tidak dapat dilepaskan dengan lingkungan umum dimana kebijakan dan program pemerintah diimplementasikan. Lingkungan akan menginformasikan dan menanggapi kebijakan publik dan mewarnai cara-cara dimana suatu argumen diperdebatkan dan klaim pengetahuan diajukan. Kebijakan berbasis bukti tidak hanya berkaitan dengan bagaimana budaya politik umum membentuk arah kebijakan, namun lebih dari itu, ada pengetahuan lain yang tidak kalah penting dalam suatu kebijakan yang dapat diperoleh. Penerapan *evidence based policy* dilakukan melalui pemanfaatan informasi dan hasil penelitian yang diperoleh dari evaluasi terhadap suatu program, dengan tujuan agar pengambilan keputusan dalam seluruh tahapan proses pemerintahan dapat berlangsung secara terarah dan sistematis. Dengan demikian, dalam proses perumusan kebijakan, dimungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penentu keberhasilan, mengungkap kesenjangan yang terjadi, serta mengevaluasi bukti-bukti terkait ketidakefektifan suatu program.

Penggunaan bukti dapat berbeda pada setiap konteks pengambilan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa bukti berperan penting dalam membantu menangani isu-isu kebijakan secara lebih spesifik dan kontekstual, sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan. Pendekatan *Evidence Based Policy* pada sistem pengambilan kebijakan untuk memantau pelaksanaan dan pengukuran hasil utama dalam meningkatkan kinerja program secara terus menerus dengan penggunaan informasi akan memberikan keuntungan bagi pemerintah (Gary Van Landingham dan mengambil pendekatan ini, pemerintah dapat:



i pengeluaran yang boros.

engenai pilihan anggaran didapatkan melalui penggunaan program, program yang tidak efektif dapat diidentifikasi dan oleh pembuat kebijakan, sehingga anggaran yang tersedia

dapat dialihkan untuk mendukung program pelayanan administrasi kependudukan yang lebih prioritas, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Memperluas program inovatif.

Mengharuskan program baru dan belum teruji menjalani evaluasi yang ketat membantu menentukan apakah mereka bekerja dan mengidentifikasi peluang untuk menargetkan pendanaan ke inisiatif inovatif yang memberikan hasil yang lebih baik kepada penduduk atau mengurangi biaya.

3. Memperkuat akuntabilitas.

Mengumpulkan dan melaporkan data tentang operasi dan hasil program membuatnya lebih mudah untuk memegang lembaga, manajer, dan penyedia bertanggung jawab untuk hasil. Hal ini meningkatkan transparansi dan memperkuat kepercayaan publik.

Secara operasional, penelitian ini merujuk pada kerangka kerja yang dikembangkan oleh The Pew Charitable Trusts dan MacArthur Foundation (2014), yang membagi penerapan kebijakan berbasis bukti ke dalam lima pilar strategis: penilaian program, pengembangan anggaran, pengawasan implementasi, pemantauan hasil, dan evaluasi tertarget.:

1. Program Assessment

Berdasarkan teori *Evidence Based Policy* menurut The Pew-Mac Arthur, program assessment atau penilaian program dalam implementasi kebijakan publik diartikan sebagai cara untuk dapat mengidentifikasi efektivitas program dalam mencapai sasaran atau tujuan dari kebijakan. Selain itu, penilaian program juga dilaksanakan sebagai cara untuk menilai bagaimana dampak yang dicapai dalam suatu program.

2. Budget Development

Fokus Budget Development dalam konsep Pew-Mac Arthur menjelaskan bahwa agar pembuatan kebijakan berbasis bukti berhasil, pemerintah harus secara sistematis menggunakan bukti keefektifan program untuk menginformasikan proses mereka untuk membuat anggaran dan keputusan kebijakan. Oleh karena itu dalam proses dan penetapan anggaran harus sesuai dengan data-data yang ada. Dengan melihat ketersediaan anggaran yang ada dalam program pembangunan yang dapat membuat proses dalam program pembangunan dapat berjalan dengan efisien dan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.



3. Implementation Oversight

Fokus Implementation Oversight dalam konsep Pew-Mac Arthur digunakan untuk memastikan bahwa suatu program yang berjalan sesuai dengan apa yang telah disusun dan dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Sehingga perlu diadakannya pelaksanaan pengawasan yang kuat baik itu dalam lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Oleh karena itu, dalam proses pelaksanaan pengawasan semua elemen harus terlibat di dalamnya untuk mencapai sasaran dan tujuan dari program perencanaan pembangunan yang diinginkan.

4. Outcome Monitoring

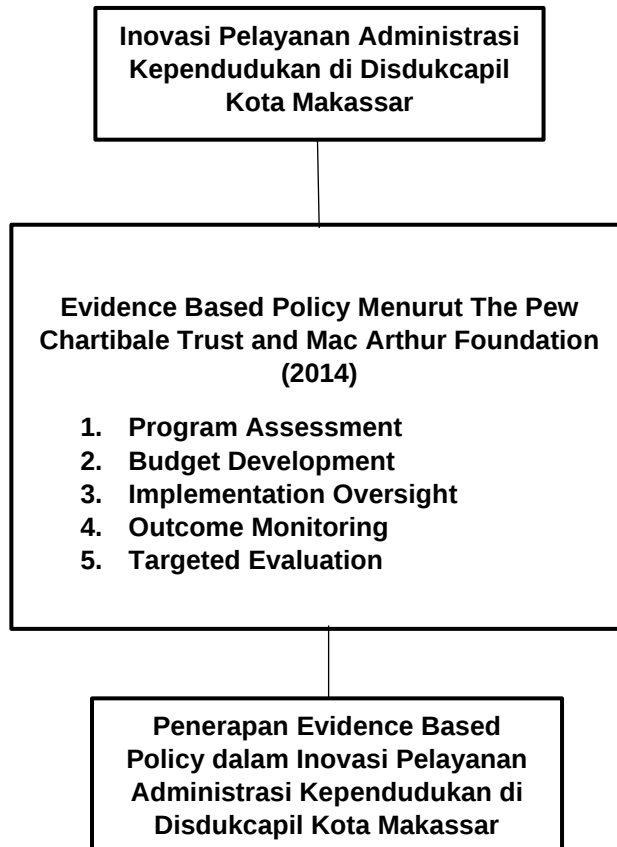
Outcome Monitoring dalam konsep Pew-Mac Arthur menjelaskan bahwa kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan atau implementasi suatu program pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui sampai dimana program tersebut telah dilaksanakan dan persoalan-persoalan apa saja yang dirasakan dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh sebab itu, kegiatan monitoring ini sebenarnya merupakan kegiatan mengikuti jalannya pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai.

5. Targeted Evaluation

Fokus targeted evaluation berdasarkan konsep Pew-Mac Arthur menjelaskan bahwa perlu dilakukannya evaluasi yang ketat terhadap implementasi suatu program untuk memastikan bahwa mereka menjamin terus pelaksanaan program secara berkelanjutan. Program dengan sedikit bukti atau informasi dapat membawa risiko yang lebih tinggi terhadap hasil program yang rendah. Oleh karena itu, perlu evaluasi langsung pelaksanaan program yang telah berjalan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan target sasaran dan tentunya untuk perencanaan selanjutnya.



Gambar I.1 Kerangka Pikir



Sumber: Olahan Peneliti (2025)

I.3 Tujuan dan Manfaat

I.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini menempatkan *Evidence Based Policy* (EBP) sebagai instrumen utama untuk membedah bagaimana setiap tahapan inovasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dikonstruksi berdasarkan prinsip yang kuat. Dengan berpijak pada kerangka pemikiran tujuan dari penelitian ini yaitu, menganalisis dan menerapkan *evidence based policy* dalam pengembangan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Kota Makassar.



I.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu sosial dan politik, khususnya pada program Studi Administrasi Publik dalam kajian kebijakan publik yang berfokus pada pendekatan *Evidence Based Policy*, serta menjadi rujukan akademis bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kebijakan berbasis data dan evaluasi empiris.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi pimpinan serta aparatur dalam memperbaiki mekanisme pengambilan keputusan, sehingga inovasi pelayanan yang diluncurkan lebih tepat sasaran dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
- Bagi Masyarakat, Sebagai informasi dan sarana advokasi agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah didasarkan pada pembuktian empiris dan aspirasi yang terverifikasi.
- Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik. Dengan menganalisis secara mendalam kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi celah-celah pengetahuan yang masih perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan berbasis bukti.



BAB II

METODE PENELITIAN

II.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah metode yang memungkinkan untuk menggali dan memahami secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif yang dimiliki oleh individu atau kelompok sosial tertentu, terutama dalam konteks permasalahan sosial atau kemanusiaan. Melalui pendekatan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang kaya tentang fenomena yang sedang diteliti. Proses penelitian bersifat sistematis yang melibatkan perumusan pertanyaan penelitian, perancangan metode pengumpulan data, pengumpulan data dari partisipan, analisis data secara induktif, dan penafsiran hasil penelitian. Laporan akhir pada penelitian ini memiliki struktur yang fleksibel. Semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini harus memiliki pendekatan yang bersifat induktif, yaitu membangun pemahaman yang lebih luas dari data spesifik yang diperoleh. Fokus penelitian haruslah pada pengalaman individu, dengan tujuan untuk menggali makna dan kompleksitas yang unik dari setiap fenomena (Creswell, 2018).

Berdasarkan pemahaman tersebut, penelitian kualitatif dapat disimpulkan sebagai sebuah pendekatan yang bersifat eksploratif, bertujuan untuk menggali secara mendalam makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Oleh karena itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia dari perspektif partisipan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran yang akurat, komprehensif, dan mendalam mengenai penerapan *evidence based policy* dalam inovasi pelayanan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar. Pendekatan deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna yang lebih dalam dan memahami konteks lebih luas yang sebenarnya terjadi di lapangan, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan.

II.2 Desain Penelitian

Metode penelitian kualitatif yang memungkinkan untuk menyelami suatu fenomena secara mendalam dengan cara menganalisis secara intensif suatu a tertentu. Melalui pengumpulan data dari berbagai sumber pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas suatu mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari terkait (bounded system) atau kasus. Suatu kasus menarik corak khas kasus tersebut yang memiliki arti pada orang lain, ti (Semiawan, 2010: 49).



Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus adalah strategi penelitian yang dimana peneliti mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan berbagai informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016). Tipe studi kasus dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan tujuan menganalisis dan mendiskripsikan suatu gejala, fakta, atau realitas yang terkait penerapan *evidence based policy* dalam inovasi pelayanan administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar.

II.3 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan salah satu langkah didalam suatu penelitian, yang dimana peneliti melakukan sebuah penelitian ke dalam konsep yang memuat indikator-indikator yang lebih rinci dan dapat diukur.

Fungsi operasionalisasi konsep ini ialah untuk mempermudah peneliti dalam melakukan sebuah analisa. Baik atau tidaknya kerangkaoperasional, diukur melalui seberapa tepat dimensi yang diurai memberikan gambaran.

Tabel II.1 Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Dimensi/Indikator	Aspek yang digali
1	<i>Penerapan Evidence Based Policy menurut The Pew Chartibale Trust and Mac Arthur Foundation (2014)</i>	Program Assessment	• Bagaimana Disdukcapil melaksanakan evaluasi rutin dan monitoring program layanan pendudukan serta uji coba (trial and error), lapangan untuk menilai keberhasilan inovasi sebelum diterapkan secara luas. • Respon masyarakat dan pengelolaan aduan sebagai tolak ukur manfaat nyata dari layanan administrasi kependudukan.
		Budget Development	• Proses penyusunan anggaran berdasarkan



			data evaluasi kinerja dan kebutuhan riil di lapangan. • Efisiensi alokasi dana dan fleksibilitas realokasi untuk program prioritas yang terbukti efektif.
	Implementation Oversight		• Prosedur pengawasan yang memastikan seluruh prosedur (SOP) dipatuhi. • Pelibatan peran pihak eksternal dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
	Outcome Monitoring		• Penggunaan instrumen pengukuran seperti survey kepuasan masyarakat (SKM) dan laporan berkala untuk melihat capaian program. • Responsivitas Dinas dalam mendeteksi masalah teknis maupun non teknis. Serta langkah yang diambil dalam melakukan perbaikan.
	Targeted Evaluation		• Pelaksanaan evaluasi yang melibatkan data target kinerja serta masukan dari pihak luar (akademisi/tenaga ahli). • Pengambilan keputusan untuk melanjutkan, memodifikasi, atau menghentikan suatu program atau inovasi berdasarkan evaluasi berbasis bukti.



II.4 Prosedur Penelitian

II.4.1 Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2018) menerangkan bahwa sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi berdasarkan situasi dan kondisi latar belakang penelitian sesuai dengan realitas yang terjadi.

Informan adalah orang yang mampu memberikan suatu penjelasan secara mendalam dan menyeluruh terkait subjek yang menjadi fokus pengumpulan data dalam penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka pemilihan informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Makassar
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 3) Pegawai Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
- 4) Masyarakat Penerima Layanan

II.4.2 Sumber data

Menurut Pohan (2007: 45) yang dikutip oleh Prastowo (2016: 204) data adalah sebuah fakta, informasi maupun keterangan yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Data dibagi menjadi dua jenis dalam ini yaitu:

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber utama yang berbentuk wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.

- 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung pada data primer dan bisa didapatkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, data sekunder biasanya berbentuk dokumen, jurnal, buku serta laporan-laporan yang bersangkutan dengan penelitian.

II.4.3 Teknik pengumpulan data



nurut Djaman Satori dan Aan Komariah (2011: 103), teknik an data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis nperoleh data yang diperlukan. Mereka menekankan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yang dan berorientasi pada tujuan penelitian yang jelas. Proses ini n ketelitian dan kehati-hatian agar data yang terkumpul dapat

memberikan gambaran yang akurat tentang fenomena yang sedang diteliti. Pengumpulan data ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur dan disengaja melalui pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi non partisipatif yaitu dengan mengamati apa yang terjadi dan dikerjakan orang di lokasi penelitian.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka untuk bertukar pikiran maupun informasi secara lisan agar mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi di lapangan (Prastowo, 2016: 212). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada informan.

3) Studi Dokumen

Dokumen yang dikaji berupa jurnal, publikasi ilmiah, buku, regulasi, dan dokumen lain yang berhubungan dengan topik penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dan metode observasi dan wawancara. Dokumen dengan data yang kredibel mengenai *Evidence Based Policy* dapat menjadi sumber yang dapat memperkaya teori dan pengetahuan yang mendukung penelitian (Fiantika dkk, 2022).

II.4.4 Teknik Analisis Data



nurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:10) menyebutkan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat an data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data ode tertentu. Hasil analisis data kemudian akan disajikan tuk yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Miles, dan Saldana (2014:31) membagi Teknik analisis data dalam

penelitian kualitatif melalui 4 tahap yaitu tahap reduksi data, penyajian data, triangulasi data dan penarikan kesimpulan

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik analisis yang merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan mengabstrakkan. dan/atau mengubah data yang menjadi bagian keseluruhan dari catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan lain-lainnya. Kondensasi data dilakukan dengan menyesuaikan data yang dijarah tanpa mengurangi data tersebut. Proses reduksi data ini dapat menunjang data secara keseluruhan tanpa harus mengurangi temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung (Miles, Huberman, dan Saldana., 2014: 31)

Dengan demikian peneliti melakukan reduksi data dengan proses mengolah data mentah yang diperoleh dari penelitian, seperti hasil wawancara, catatan lapangan, atau dokumen, menjadi informasi yang lebih terfokus dan bermakna.

2) Penyajian Data

Tahap penyajian data merupakan bagian integral dari proses analisis data yang diberikan Miles dan Huberman. Kegiatan penyajian data dalam analisis kualitatif bertujuan untuk menyusun dan mengorganisasikan data yang telah dianalisis menjadi sebuah kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Dengan menyandingkan berbagai kelompok data, peneliti dapat melihat hubungan dan pola, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Haryoko, dkk., 2020: 212). Pada tahap ini peneliti menyajikan data yang sebelumnya telah diperoleh, data tersebut harus tepat dan akurat, serta memungkinkan peneliti untuk membangun narasi dan meyakinkan tentang fenomena yang sedang diteliti.

3) Triangulasi Data

Triangulasi (Moleong, 2019) yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah:



- Tringulasi sumber, melakukan pengecekan data yang diperoleh selama penelitian melalui berbagai sumber atau informan, yang dimana dapat meningkatkan kredibilitas data (Alfansyur, Andarusni, 2020). setelah data dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber, mereka harus gambarkan, dikategorikan, dan dievaluasi dari berbagai perspektif.
- Tringulasi metode, membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara serta dengan isi dokumen yang berkaitan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan apakah data yang didapatkan pada saat wawancara sudah sesuai dengan kebutuhan peneliti.

4) Penarikan Kesimpulan

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif yang saling berhubungan erat dengan tahap-tahap sebelumnya. Setelah melakukan kondensasi dan penyajian data, peneliti kemudian menarik kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan melakukan verifikasi terhadap temuan-temuan yang telah diperoleh. Tahapan penarikan kesimpulan adalah proses berpikir kritis di mana peneliti memberikan makna dan arti terhadap temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara, observasi, atau dokumen.

Pada tahap ini peneliti akan mengintegrasikan semua temuan yang telah diperoleh untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan bermakna tentang fenomena yang diteliti. Peneliti juga melakukan konfirmasi untuk memastikan bahwa interpretasi yang telah dibuat terhadap data benar-benar akurat dan relevan dengan konteks penelitian.



absahan Data

absahan data dilakukan untuk menguji data dan memastikan penelitian itu benar-benar penelitian ilmiah. Dalam penelitian eabsahan data diuji dengan berbagai cara, termasuk uji ity, dependability, dan confirmability. Data yang digunakan

dalam penelitian kualitatif harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah (Hwa, 2011).

1) Uji Transferabilitas

Pada penelitian ini untuk mencapai kriteria keteralihan, peneliti mendeskripsikan seluruh rangkaian penelitian secara lengkap, terperinci, dan sistematis, sehingga konteks penelitian dapat tergambar jelas dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peneliti. Uraian yang rinci mengenai temuan-temuan yang diperoleh akan membantu peneliti lain ketika ingin mempergunakan data hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil penelitian yang telah dilakukan.

2) Uji Dependabilitas

Pada penelitian ini pemenuhan kriteria dependabilitas dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi data dengan sebaik mungkin. Selain itu dilakukan penelaahan data secara menyeluruh bersama-sama dengan pembimbing skripsi. Dalam hal ini seluruh transkrip hasil wawancara dan kerangka tema yang telah disusun peneliti diserahkan kepada pembimbing skripsi untuk mendapatkan masukan dan perbaikan.

3) Uji Konfirmabilitas

Pada penelitian ini konfirmabilitas dipenuhi dengan memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar berasal dari data, bukan dari asumsi atau bias peneliti. Peneliti menyertakan jejak audit berupa catatan proses penelitian, transkrip wawancara, serta hasil analisis yang dapat ditelusuri kembali oleh pembimbing atau pihaklain. Seluruh proses pengumpulan dan analisis data juga dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memastikan objektivitas dan kesesuaian antara data dan kesimpulan penelitian.

